



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Peningkatan Kualitas RB Pemda di Jawa Barat Dalam Mewujudkan Agenda Pembangunan

22 April 2024

bangga
melayani
bangsa



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI



VISI

Terwujudnya Pemerintahan Berkelas Dunia

- Pemerintahan yang bebas KKN
- Profesional
- Memberikan pelayanan prima

2024

DYNAMIC GOVERNANCE

Birokrasi semakin efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri agile dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.

03

2014

RULE BASED BUREAUCRACY

Birokrasi cenderung kaku dan berorientasi pada aturan.

01

02

2019

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

Birokrasi berorientasi hasil, manajemen kinerja diterapkan, dan didukung SPBE.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Isu Strategis RB Tahun 2020–2024

TINGKAT HULU (TATA KELOLA PEMERINTAHAN)

- Birokrasi yang Belum Kolaboratif
- Transformasi Digital yang Belum Optimal
- Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas
- Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala
- Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

TINGKAT HILIR (PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL)

- Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan
- Tantangan resesi global dan pentingnya investasi
- Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik
- Dampak inflasi yang tidak terkendali

Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TUJUAN RB 2020-2024

**BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF
DAN BERDAYA SAING MENDORONG
PEMBANGUNAN NASIONAL**

INDIKATOR OUTCOME

- Indeks RB Nasional
- *Corruption Perception Indeks*
- *E-Government Development Index (EDGI)*
- *Government Effectiveness Index (GEI)*

INDIKATOR IMPACT

- Capaian Indikator Kinerja Pemerintah
- Tingkat kemiskinan Nasional
- Tingkat realisasi investasi Nasional
- Tingkat Inflasi nasional



SASARAN RB 2020-2024

RB GENERAL

Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel

- Indeks SPBE
- Tingkat Capaian Kinerja (Penajaman Nilai AKIP dan Indeks Perencanaan)
- Tingkat akuntabilitas Keuangan

Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

- Survei Penilaian Integritas
- *Employer Branding*
- Survei Kepuasan Masyarakat

RB TEMATIK

RB yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong daya saing Indonesia dengan penyelesaian masalah tata kelola pada berbagai program pengentasan **kemiskinan**, peningkatan **Investasi**, akselerasi **digitalisasi administrasi pemerintahan**, **RB Tematik Prioritas Presiden**.



Indikator Tahun 2023:

- Penurunan Tingkat Kemiskinan
- Peningkatan Realisasi Investasi
- Penurunan Stunting
- Laju inflasi
- Tingkat Penggunaan PDN

MILESTONE EVALUASI REFORMASI BIROKRASI



JENIS DAN PELAKSANAAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KOLABORASI EVALUATOR NASIONAL & EVALUATOR MESO

- 1 Hasil penilaian TPN dan Meso disampaikan melalui Portal RB
- 2 Melakukan Konfirmasi dan Validasi hasil penilaian
- 3 Mendorong Meso untuk Perluasan cakupan Pembinaan
- 4 Meningkatkan Kualitas Evaluasi Indikator Meso





Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi

KOMPONEN EVALUASI

RB General		RB Tematik	
KOMPONEN	BOBOT	KOMPONEN	BOBOT
Staregi Pelaksanaan RB General	10	Capaian RB Tematik	10
Capaian Pelaksanaan Kebijakan	40	Total	10
Capaian Sasaran Strategis	50		
TOTAL	100		

Kementerian/Lembaga		Pemerintah Daerah	
KOMPONEN	BOBOT	KOMPONEN	BOBOT
Strategi Pelaksanaan RB Tematik	5	Capaian Indikator Dampak	15
Total	20	Total	20

Total Bobot
 Kementerian/Lembaga : 100+10 = 110
 Pemerintah Daerah : 100 + 20 = 120

KATEGORI HASIL EVALUASI

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 100	Memuaskan
3.	A-		Memuaskan dengan Catatan
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4.	B	>60 -70	Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

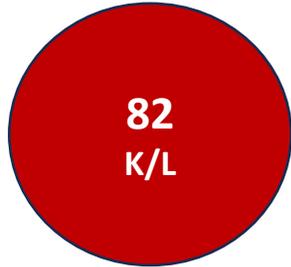
Hasil evaluasi tahun 2023 tidak bisa diperbandingkan dengan indeks RB tahun sebelumnya karena adanya perubahan komponen, bobot dan kategori hasil penilaian



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Hasil EVALUASI RB TAHUN 2023



RATA RATA
76,81

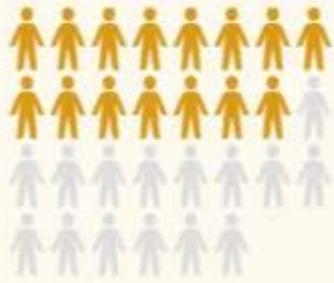


RATA RATA
69,71



RATA RATA
59,32

PREDIKAT	KL	PROV	KAB/KOT	TOTAL
AA	0	0	0	0
A	26	5	35	66
BB	44	13	100	157
B	12	12	135	159
CC	0	2	119	121
C	0	2	90	92
D	0	0	29	29
Total	82	34	508	624
Populasi	82	34	508	624
≥B	82	30	270	382
%	100,00%	88,24%	53,15%	61,22%



dari 431 Pemda, tercatat 456 Kab kota mengambil RB Tematik Kemiskinan

DATA PENURUNAN KEMISKINAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Maret 2022

Maret 2023



**Bottlenecking Aspek
Tata Kelola**

Pemutakhiran basis data
untuk ketepatan
pensasaran program.

Perbaiki dan monev untuk
peningkatan kualitas
pelaksanaan program

Konvergensi program antar
instansi pemerintah dan non
pemerintah.

**Aksi Utama Penanganan
Kemiskinan**

Meningkatkan pendapatan
masyarakat

Meningkatkan infrastruktur
untuk mengurangi daerah
kantong kemiskinan

Memberikan bantuan dan subsidi
untuk menurunkan beban
pengeluaran

Kenaikan Realisasi Investasi

Rp. 1,053,100.43

TW III. 2023

data : BKPM

Rp. 892,417.87

TW III. 2022

**Aksi utama dalam peningkatan
realisasi investasi :**

Penyederhanaan prosedur

Sosialisasi masif penetapan
NIB

Kemudahan bagi investor
besar





Prioritas Presiden | Pengendalian Inflasi 2023

Realisasi inflasi **terendah** sejak tahun 2000

Capaian inflasi 2023 mencapai 2,61 (yoy) menurun dibanding 2022 sebesar 5,51 (yoy)

Dukungan penuh dari seluruh instansi pemerintah

28 K/L, 28 Provinsi dan 299 Kab/Kota memilih tema pengendalian inflasi sebagai fokus pembangunan RB 2023

Aksi Utama

Gerakan Pangan Murah

dikoordinasikan oleh Badan Pangan pada 1.626 lokasi di 36 Provinsi dan 324 Kab/Kota

Operasi Pasar Murah

dilaksanakan oleh 488 Kab/kota untuk menahan gejolak harga di daerah



Peningkatan Penggunaan PDN

Peningkatan PDN merupakan instruksi Presiden dan dijadikan tematik mandatori yang wajib dipilih oleh setiap K/L/D.



Realisasi penggunaan PDN di tahun 2023 mencapai

90 %

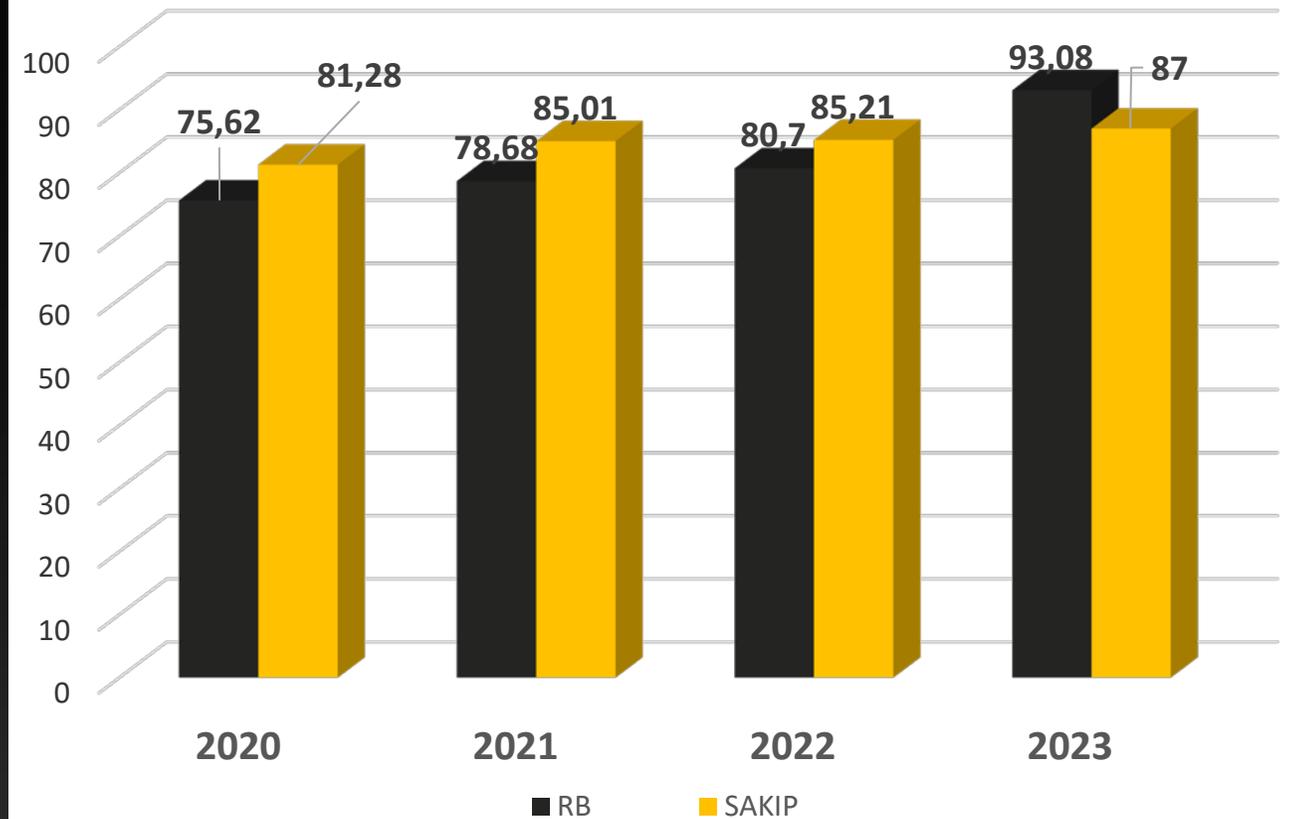
data : LKPP

LET'S SEE!

Perkembangan Nilai SAKIP & RB Provinsi Jawa Barat

2023

- **Indeks RB Pemprov Jabar** terus meningkat dalam empat tahun terakhir, puncaknya pada tahun 2023 indeks RB Pemprov Jabar mencapai angka 93,08 dengan predikat "A".
- **Nilai SAKIP Pemprov Jabar** terus meningkat dalam empat tahun terakhir, dan pada tahun 2023 menjadi angka 87 dengan predikat "A".





CAPAIAN INDEKS RB PEMDA DI JAWA BARAT Tahun 2023

No.	Nama Instansi Pemerintah	CAPAIAN INDEKS RB PEMDA DI JAWA BARAT				PREDIKAT
		2020	2021	2022	2023	
1	KABUPATEN BANDUNG	64,33	63,25	63,32	83,67	A-
2	KOTA BANDUNG	71,75	72,66	75,18	83,58	A-
3	KOTA DEPOK	62,90	63,13	64,78	82,14	A-
4	KABUPATEN SUMEDANG	66,74	68,75	71,81	81,98	A-
5	KABUPATEN KARAWANG	62,20	60,16	63,36	81,50	A-
6	KOTA CIMAH	59,22	60,01	62,96	81,26	A-
7	KOTA BOGOR	67,01	67,67	70,76	80,97	A-
8	KOTA BANJAR	55,93	57,07	58,76	80,74	A-
9	KOTA BEKASI	66,65	64,75	66,32	78,94	BB
10	KOTA TASIKMALAYA	57,58	60,04	61,70	78,14	BB
11	KABUPATEN SUKABUMI	61,11	62,45	63,00	78,08	BB
12	KABUPATEN BOGOR	67,03	67,97	67,76	78,02	BB
13	KABUPATEN CIAMIS	57,47	59,26	63,59	77,05	BB
14	KOTA SUKABUMI	68,25	67,91	71,05	74,78	BB
15	KABUPATEN PURWAKARTA	60,06	61,41	62,42	74,10	BB
16	KOTA CIREBON	62,84	63,53	66,57	73,91	BB
17	KABUPATEN PANGANDARAN	52,06	53,64	56,48	73,72	BB
18	KABUPATEN MAJALENGKA	53,88	56,84	58,46	73,52	BB
19	KABUPATEN BEKASI	59,66	58,33	59,83	72,96	BB
20	KABUPATEN BANDUNG BARAT	57,60	57,81	60,97	72,27	BB
21	KABUPATEN TASIKMALAYA	54,05	53,86	58,95	71,22	BB
22	KABUPATEN SUBANG	57,20	58,33	58,03	70,86	BB
23	KABUPATEN INDRAMAYU	57,99	58,70	59,84	68,73	B
24	KABUPATEN GARUT	66,25	66,65	68,89	68,50	B
25	KABUPATEN KUNINGAN	53,03	54,75	56,78	68,22	B
26	KABUPATEN CIREBON	56,18	56,81	56,95	67,83	B
27	KABUPATEN CIANJUR	59,65	60,25	62,39	64,86	B
RATA - RATA		57,73	58,53	60,50	70,82	BB

Tindak Lanjut

- Peningkatan kualitas Rencana Aksi Pembangunan Rb General dan RB Tematik yang lebih berfokus dalam rangka pencapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi
- Mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi pada setiap indikator penilaian khususnya pada indikator dengan skor yang belum mencapai baik sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi
- Melakukan pemetaan terhadap indikator yang belum dievaluasi serta berkoordinasi aktif dengan KL Messo terkait untuk memastikan setiap indikator pada penilaian reformasi birokrasi dapat dievaluasi
- Penguatan Tim RBI dan TPI dalam melakukan monev baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan evaluasi internal



Nilai SAKIP Pemda Di Jawa Barat Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP			
		2022	2023	PROGRES	PREDIKAT
1	KOTA BANDUNG	80,12	80,56	0,44	A
2	KOTA SUKABUMI	76,68	77,73	1,05	BB
3	KABUPATEN SUMEDANG	76,15	77,16	1,01	BB
4	KOTA BOGOR	75,10	76,73	1,63	BB
5	KABUPATEN GARUT	74,38	74,91	0,53	BB
6	KOTA TASIKMALAYA	70,73	71,83	1,10	BB
7	KABUPATEN BANDUNG	71,35	71,76	0,41	BB
8	KABUPATEN CIAMIS	68,90	69,30	0,40	B
9	KABUPATEN BOGOR	68,83	69,06	0,23	B
10	KABUPATEN BANDUNG BARAT	68,03	68,59	0,56	B
11	KOTA CIREBON	68,08	68,56	0,48	B
12	KABUPATEN SUBANG	67,33	68,32	0,99	B
13	KOTA BANJAR	68,00	68,30	0,30	B
14	KABUPATEN MAJALENGKA	67,10	68,00	0,90	B
15	KABUPATEN PANGANDARAN	67,72	67,99	0,27	B
16	KABUPATEN CIREBON	67,71	67,84	0,13	B
17	KOTA DEPOK	67,10	67,32	0,22	B
18	KABUPATEN CIANJUR	66,83	67,18	0,35	B
19	KOTA BEKASI	65,48	67,10	1,62	B
20	KABUPATEN KARAWANG	66,57	66,95	0,38	B
21	KABUPATEN PURWAKARTA	66,19	66,57	0,38	B
22	KABUPATEN SUKABUMI	65,95	66,21	0,26	B
23	KOTA CIMAHI	65,14	65,90	0,76	B
24	KABUPATEN BEKASI	65,17	65,86	0,69	B
25	KABUPATEN KUNINGAN	66,39	65,13	-1,26	B
26	KABUPATEN INDRAMAYU	64,03	64,98	0,95	B
27	KABUPATEN TASIKMALAYA	63,41	64,20	0,79	B

Catatan:

1. Dokumen perencanaan belum dilakukan reviu secara berkala sehingga belum dilakukan penyempurnaan dokumen perencanaan sesuai kondisi yang terbaru.
2. Beberapa kab/kota yang rumusan indikator kinerjanya belum lengkap belum didiukung dengan data yang valid
3. Pelaporan kinerja masih berisi laporan kegiatan, belum fokus terhadap capaian kinerja
4. Sebagian kab/kota pengukuran dan pelaporan belum dilakukan secara berkala;;
5. Sebagian kab/kota yang sudah membangun aplikasi namun belum digunakan sebagai alat dalam mengukur capaian kinerja organisasi
6. Beberapa kab/kota belum menjadikan ukuran kinerja sebagai dasar pemberian Reward and punishment
7. Pemahaman dan kompetensi dari TPI belum merata dalam pelaksanaan evaluasi internal
8. Pemantauan tindak lanjut dari hasil evaluasi internal belum berjalan maksimal



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

1. PERENCANAAN KINERJA

- a. Menetapkan Tujuan dan Sasaran (*outcome*) sesuai kondisi yang ingin dicapai
- b. Menselaraskan tujuan/sasaran dari level Instansi dengan level Unit kerja
- c. Mengkaitkan program dan kegiatan dengan tujuan/sasaran (*outcome*) yang ingin dicapai
- d. Menggunakan Indikator Kinerja yang SMART
- e. Kinerja lebih baik harus lebih baik dari capaian tahun sebelumnya

2. PENGUKURAN KINERJA

- a. Pantau dan evaluasi secara berkala
- b. Pengukuran dilakukan secara berjenjang
- c. Pengukuran menggunakan teknologi informasi
- d. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai alat untuk menilai dan meningkatkan kinerja

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

STRATEGI PENINGKATAN SAKIP

3. PELAPORAN KINERJA

- a. Penyajian fokus pada realisasi pencapaian kinerja organisasi terhadap target yang ditetapkan
- b. Sajikan keberhasilan dan kegagalan/permasalahan dengan analisis yang memadai
- c. Perbandingan dengan capaian kinerja pada organisasi sejenis
- d. Capaian kinerja menurut perspektif berbagai stakeholder
- e. Laporan sebagai dasar dalam perbaikan perencanaan berikutnya

4. EVALUASI INTERNAL

- a. mengukur kinerja, bukan hanya pencapaian target kegiatan dan keuangan
- b. Pelaksanaan evaluasi mampu memperbaiki perencanaan, penilaian kinerja dan peningkatan kinerja organisasi
- c. Peningkatan kualitas sumber daya yang menangani evaluasi internal



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa

TERIMA KASIH..